

DIBAHAS DALAM RAPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Hak Pengajaran Penganut Aliran Kepercayaan Diakomodasi

YOGYA (KR) - Siswa atau peserta didik yang menganut aliran kepercayaan di Kota Yogya ke depan bakal memperoleh hak pengajaran. Hal itu juga telah disepakati antara eksekutif dan legislatif ketika membahas rancangan peraturan daerah (raperda) terkait penyelenggaraan pendidikan.

Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan guna menyesuaikan peraturan baru di atasnya, termasuk Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. "Aturan lama yang berlaku di Kota Yogya nanti akan digantikan dengan raperda yang

sekarang sedang dibahas. Ada klausul baru yakni mengakomodasi hak pengajaran bagi siswa penganut aliran kepercayaan," ungkap anggota panitia khusus (pansus) pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Antonius Fokki Ardiyanto, Jumat (14/7).

Menurut Fokki proses pembahasan raperda tersebut sudah mendekati tahap akhir. Beberapa rangkaian yang sudah dilakukan ialah paparan awal dari eksekutif, rapat dengan pendapat umum, studi banding hingga penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) dan usulan masyarakat. Dalam proses penyusunan DIM dan usulan masyarakat menjadi titik awal diakomodasinya hak pengajaran bagi penganut aliran kepercayaan.

Fokki mengaku, mulanya eksekutif belum menyematkan

pasal mengenai hal tersebut. Padahal pendidikan agama merupakan salah satu hak pengajaran yang harus diakomodasi oleh setiap peserta didik sesuai agamanya. Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kepada Satuan Pendidikan. "Tim eksekutif belum memasukkan hak pengajaran bagi penganut aliran

kepercayaan. Saya lantas mengusulkan itu karena merupakan amanat undang-undang," imbuhnya.

Dari berbagai argumen serta mendasarkan regulasi yang ada, akhirnya tim eksekutif memberikan persetujuan. Akan tetapi karena sejak awal belum dimasukkan dalam klausul Raperda Penyelenggaraan Pendidikan maka dalam proses pembahasan selanjutnya akan disematkan pasal baru mengenai hal tersebut.

Oleh karena itu, ketika sudah masuk dalam klausul per-

aturan daerah maka ketika aturan sudah berlaku penuh harus dijalankan secara menyeluruh. Terutama satuan pendidikan yang di dalamnya terdapat siswa penganut aliran kepercayaan maka wajib menyediakan pengajar khusus layaknya pelajaran pendidikan agama. "Harapan ke depannya Kota Yogya menjadi kota yang semakin inklusif dan toleran serta harmoni dapat terwujud dalam rangka mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," tandas Fokki. **(Dhi)-f**

Sumbu Filosofi Kaya Nilai Universal

YOGYA (KR) - Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan karya kreatif jenius luar biasa yang kaya akan nilai-nilai universal. Sumbu filosofi merupakan kristalisasi penghayatan manusia Jawa tentang nilai-nilai yang harus dimiliki manusia agar tercipta dunia yang indah, nyaman, dan tenteram. Karena itu, keberadaan Sumbu Filosofi mendapatkan apresiasi dan dukungan dari perwakilan negara Komite Warisan Dunia (World Heritage) UNESCO yang hadir dalam agenda Bringing the Cosmological Axis of Yogyakarta to the World, agar menjadi warisan dunia UNESCO.

"Mengapa kami mengajukan Sumbu Filosofi agar ternominasi sebagai warisan dunia. Karena kami ingin melestarikan secara berkelanjutan nilai-nilai universal tersebut agar dapat menjadi tempat belajar bersama seluruh umat

manusia dalam upaya melindungi, memelihara, dan membina keindahan serta keselamatan dunia," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Hotel Melia Purosani, Jumat, (14/7)

Sultan mengatakan, apabila Sumbu Filosofi diterima sebagai Warisan Dunia, upaya pelestarian nilai-nilai universalnya akan dapat semakin kuat dilakukan. Sehingga nilai-nilai luhur yang di kandunginya akan semakin terjamin keberadaannya dan dapat diwariskan pada generasi mendatang.

"Kami berkomitmen untuk mengelola kawasan sumbu filosofi ini secara tepat. Hal itu penting agar nilai-nilai universal dan atribut warisan budaya tersebut dapat dilestarikan dan dijaga bagi kepentingan seluruh umat manusia di masa kini maupun mendatang. Dengan demikian, nilai-nilai terse-

but akan dapat terus menginspirasi lebih banyak kalangan untuk menciptakan tata dunia yang lebih baik dan menguntungkan bagi semua pihak," papar Sultan.

Sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar negeri, Yohpy Ihsan Wardana mengungkapkan Sumbu Filosofi mengandung cara-cara hidup yang harmonis antara manusia, alam dan kehidupan spiritual. Pengetahuan itu tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Yogyakarta, tapi juga penting untuk pembangunan berkelanjutan dalam tataran global.

"Poros kosmologis bukan hanya bagian dari sejarah dan budaya Yogyakarta, tetapi juga bagian dari peradaban global. Kami percaya bahwa dukungan dari anggota Komite Warisan Dunia sangat diperlukan," ungkapnya. Sedangkan perwakilan anggota

Komite Warisan Dunia yang hadir dalam agenda Bringing the Cosmological Axis of Yogyakarta to the World tersebut. Meliputi Ambassador Itali Benedetto Latteri, Ambassador Republik Federal Nigeria, Usman Ari Ogah, Charge d'Affaires of the Embassy Republik Argentina Juan Ignacio Lacunza, Deputy Head of Mission of the Embassy Mexico Alonso Martin-Gomez-Favila, dan Deputy Head of Mission of the Embassy Thailand Hathaichanok Riddhagni Frumau.

Sesi utama dari agenda ini adalah presentasi mengenai Sumbu Filosofi yang disampaikan oleh Sekretaris DIY Benny Suharsono. Seluruh Duta Besar yang hadir memberikan apresiasi dan dukungannya kepada Sumbu Filosofi. Materi serta hasil kunjungan mereka hari ini akan menjadi bahan pertimbangan Komite Warisan Dunia. **(Ria)-f**

MASUK KATEGORI FAMILI LAIN

Siswa Baru 'Numpang KK' Jadi Sorotan

YOGYA (KR) - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Yogya masih terus berlanjut meski proses tersebut sudah usai. Hal ini lantaran temuan siswa baru yang diduga menumpang Kartu Keluarga (KK) dengan masuk kategori famili lain demi diterima melalui jalur zonasi wilayah.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY bahkan sudah menerima aduan terkait hal tersebut. Lembaga tersebut kini juga tengah melakukan pendalaman guna menelusuri proses PPDB di Kota Yogya serta alur perpindahan penduduk. "Kami butuh data untuk melakukan pendalaman. Sehingga cukup penting untuk klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya," tandas Perwakilan Tim Lapangan ORI DIY Rifki Tau-

fiqurrahman, usai mendatangi Dindikcapil Kota Yogya di kompleks Balaikota, Rabu (12/7).

Salah satu aduan yang diterima ORI DIY ialah satu rumah yang tidak jauh dari salah satu SMP negeri yang diisi oleh dua KK. Masing-masing KK tersebut terdapat sepuluh famili lain usia sekolah, sehingga total ada 20 anak famili lain. Hal itu bisa menjadi modus agar bisa langsung diterima di SMP negeri favorit dengan jalur zonasi wilayah dengan menumpang KK.

Kendati demikian, fenomena menumpang KK dalam regulasi kependudukan sebenarnya cukup wajar. Akan tetapi jika hal itu dikaitkan dengan proses PPDB dengan jalur zonasi wilayah maka bisa menimbulkan polemik. Apalagi jika ada pihak yang cukup dirugikan dengan fenomena terse-

but. "Data-data sudah kami dapatkan. Nanti tinggal dikaji karena temuan seperti ini tidak hanya di Kota Yogya tetapi juga kabupaten lain. Meski itu kondisi wajar namun bisa bermasalah ketika dihadapkan dengan regulasi PPDB," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dindikcapil Kota Yogya Septi Sri Rejeki, menilai dalam regulasi administrasi kependudukan sudah diatur dan diperbolehkan pindah kependudukan tanpa batas waktu. Terutama sepanjang mengantongi surat keterangan warga negara Indonesia dari daerah asalinya. Dirinya juga menjamin validitas data kependudukan kependudukan tersebut.

Oleh karena itu ketika seluruh persyaratan sesuai undang-undang sudah dipenuhi maka pihaknya juga tidak bisa memberikan

penolakan dan harus memproses administrasi. "Kalau ajuan itu kami tolak justru bisa PTUN. Jadi statusnya itu saudara jauh dan dalam KK dimasukkan famili lain. Jadi ada wadahnya dan semua sudah sesuai prosedur," jelasnya.

Meski begitu jajarannya juga siap menerima setiap masukan untuk perbaikan proses PPDB yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dirinya, imbu Septi, juga berharap proses PPDB di Kota Yogya berjalan dengan jujur, adil dan meminimalisir setiap celah atau kelonggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan. Misalnya selain mensyaratkan KK, kepastian domisili juga bisa dipastikan secara faktual. Sehingga jika masuk dalam KK namun ternyata tidak domisili bisa dicoret dalam PPDB. **(Dhi)-f**

KESBANGPOL GANDENG FORUM PEMBARUAN KEBANGSAAN Kondusivitas Wilayah Jadi Tanggung Jawab Bersama

YOGYA (KR) - Kota Yogya memiliki karakteristik yang heterogen karena terdapat banyak suku, etnis dan ras yang tinggal bersama dalam satu wilayah. Oleh karena itu dalam menjaga kondusivitas wilayah bukan hanya menjadi tugas pemerintah melainkan tanggung jawab bersama.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya Nyke Lestari, mengungkapkan pihaknya telah menggandeng Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) yang saat ini sudah tersebar di tiap kementren. "Kemarin kami sudah mengundang pertemuan dari perwakilan suku, etnis dan ras yang ada di Kota Yogya dalam bentuk sarasehan. Kami ingin Kota Yogya selalu kondusif," tandasnya, Jumat (14/7).

Kondisi masyarakat yang heterogen diakuinya memiliki potensi gangguan sosial hingga berujung keadaan yang tidak kondusif. Apalagi jelang Pemilu 2024 dengan intensitas politik yang semakin meningkat. Harapannya

dengan semakin seringnya pertemuan dan komunikasi yang terjalin antar suku, etnis dan ras mampu meningkatkan hubungan yang harmonis. Jika sewaktu-waktu terjadi persoalan, maka dapat dengan cepat diantisipasi dan dicegah agar tidak semakin meluas.

Nyke juga berharap, dengan adanya FPK Kota Yogya yang tersebar diseluruh kementren dapat saling bekerja sama lintas etnis, suku dan ras dalam menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2024. Apalagi FPK Kota Yogya

merupakan salah satu wadah di bawah koordinasi Badan Kesbangpol Kota Yogya untuk merawat kesatuan dan persatuan. "Kami juga mengumpulkan saran dan masukan dari setiap paguyuban yang mewakili masing-masing suku, etnis dan ras di Kota Yogya. Harapannya, dari pertemuan atau sarasehan kemarin bisa memunculkan program atau kegiatan lanjutan," katanya.

Ketua FPK Kota Yogya P Wahyu Susanto, mengungkapkan pertemuan kemarin merupakan ke-

giatan yang pertama kali dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan dari beberapa suku, etnis dan ras yang tinggal di Kota Yogya. Sejumlah perwakilan yang terlibat antara lain dari Papua, Maluku, Bali, Batak, Jakarta, suku Jawa, Madura serta Ras Arab. Dirinya berharap berbagai kelompok etnis, suku dan rasa yang tinggal di Kota Yogya bisa lebih mengenal tradisi dan budaya sehingga mampu lebih memahami dan menjaga kondusivitas yang selama ini telah terbangun. **(Dhi)-f**

MPLS SD Muh Suronatan Kedepankan Pendidikan Karakter



KR-Riyana Ekawati

Siswa SD Muh Suronatan saat mengikuti kegiatan MPLS di sekolahnya.

YOGYA (KR) - Pendidikan karakter anak bisa diawali dari hal-hal sederhana termasuk melalui kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Paling tidak hal itu yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Suronatan untuk mengisi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan MPLS dilakukan selain untuk pengenalan sekolah juga pembentukan karakter anak. Dengan begitu selain anak lebih peduli (peka) terhadap lingkungan sekitar, juga meningkatkan pemahaman ilmu agama.

"Kegiatan MPLS sengaja kami kemas secara menyenangkan agar siswa merasa nyaman saat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Kami sadar bahwa kecerdasan akademik saja tidak cukup jadi pendidikan karakter menjadi suatu keharusan yang harus ditanamkan sejak usia dini. Untuk itu selama MPLS kami terus melakukan penguatan pendidikan karakter," kata Kepala SD Muhammadiyah Suronatan M Slamet Riyanto MPd didampingi Koordinator Bidang Kurikulum sekaligus Ketua MPLS SD Muh Suronatan, Beny Purwoko di sekolahnya, Jumat (14/7).

Beny mengatakan, dalam MPLS tahun ini sekolah mengambil tema 'Adab Dulu Baru Ilmu'. Tema itu dipilih karena pihak sekolah ingin menyiapkan siswa untuk berperilaku sopan santun baik saat di lingkungan kelas, sekolah maupun di lingkungan keluarga. Hal itu penting karena kesuksesan pendidikan tidak hanya ditentukan dari kemampuan akademik, tapi perlu diimbangi dengan karakter yang baik dan ilmu agama. Untuk mewujudkan hal itu keberadaan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam merancang isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan mata ajar, dan manajemen pendidikan yang baik.

"Selama MPLS lebih banyak kami isi dengan permainan. Seperti game, olahraga, permainan sampai pentas seni. Meski dikemas secara sederhana tapi antusiasme siswa cukup tinggi, buktinya mereka semangat selama mengikuti kegiatan," terang Beny. **(Ria)-f**

اللَّهُمَّ إِنَّا الْغَيْرُ الْجَعُولُ
Segepan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY turut berduka cita
sedalam-dalamnya atas meninggalnya



SUHARWANTA, S.T.
(Pimpinan DPRD DIY pada Usia 57 Tahun)

Meninggal pada Hari Jumat Legi, tanggal 14 Juli 2023
pukul 07.50 WIB di Rumah Sakit Elisabeth Ganjuran, Bantul
Jenazah setelah disemayamkan di rumah duka Plumbungan
RT 001, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul
(Barat Masjid Al Amna) dan telah dimakamkan pada Jumat Legi,
14 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB siang di Makam Kebondukuh,
Plumbungan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.

Demikian berita duka ini kami sampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Keluarga yang berduka
Inna Arrada (Istri)

Anak :
- Nabila Fatma
- Rifyan Rachman Bimoseno
- Rifyan Rachmin Bimoseno
- Rifka Az-Zahra Yasmine
- Salma Harwinda

Ketua DPRD DIY

Nuryadi S.P.

BANK BPD DIY
Mengucapkan
Selamat & Sukses
HUT Ke-43
TWOC
PT TAMAN WISATA CANDI
BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)